

Laporan Penelitian

**PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DARI IDIALITAS PEMBANGUNAN  
MENUJU KESEJAHTRAAN MASYARAKAT BERBASIS POTENSI DAERAH  
DI KABUPATEN RAJA AMPAT**



*Oleh:*

Bustamin Wahid  
NIDN: 1425058801

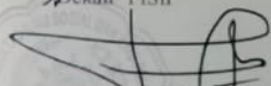
**ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG  
2020**

### HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN

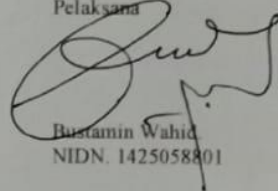
1. Judul Penelitian : Pembangunan Infrastruktur dari Idealitas Pembangunan Menuju Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Daerah di Kabupaten Raja Ampat
2. Bidang Penelitian : Ilmu Sosial dan Politik
3. Ketua
  - a. Nama Lengkap : Bustamin Wahid.
  - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - c. NIDN : 1425058801
  - d. Disiplin ilmu : Ilmu Administrasi Negara
  - e. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat 1/IIIb
  - f. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
  - g. Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  - h. Alamat : Jl.Pendidikan No. 27 Malaengkeddi Sorong
  - i. Telpon/Faks/E-mail : -
  - j. Alamat Rumah : Jl. Cendrawasi
  - k. Telpon/Faks/E-mail :
4. Jumlah Anggota :
  - a. Nama Anggota I : -
5. Lokasi Penelitian : Sorong, Papua Barat
6. Waktu : Desember 2020
7. Jumlah biaya : Rp 3.000.000.-
8. Sumber Pembiayaan : Mandiri

Sorong, 20 Desember 2020

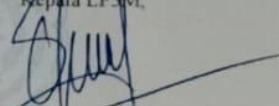
Mengetahui,  
Dekan FISIP

  
Ari Purmanto, S.Pd., M.Si.  
NIDN. 1217018201

Pelaksana

  
Bustamin Wahid  
NIDN. 1425058801

Menyetujui  
Kepala LP3M,

  
Muhammad Syahrul Kahar, S.Pd., M.Pd.  
NIDN. 1406019001

# **PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DARI IDIALITAS PEMBANGUNAN MENUJU KESEJAHTRAAN MASYARAKAT BERBASIS POTENSI DAERAH DI KABUPATEN RAJA AMPAT**

<sup>1</sup>Bustamin Wahid, M.Si

<sup>1</sup>Dosen fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sorong

***Abstract:** This article or paper was submitted as a requirement as a requirement to be submitted as a government consultant in Raja Ampat Regency. The aim is to describe descriptively one of the main tasks and functions as the Public Works and Public Housing Office of the Regency. Raja Ampat with a tourism perspective. Articles/papers are written from the process of personal experience while serving in the PUPR office of Kab. Raja Ampat and received a reference from the vision and mission of the district government. Raja Ampat. There are two important things that the author will explain on this occasion, namely: (1) the main tasks and functions of the Public Works and Public Housing (PUPR) Service, and (2) Tourism-Based Infrastructure Development which has a welfare effect.*

***Keywords:** Infrastructure Development, Development Idiality and Community Welfare*

**Abstrak:** Atikel atau makalah ini diajukan sebagai suatu persyaratan sebagai syarat untuk diajukan sebagai konsultana pemerintah di Kabupaten Raja Ampat. Tujuan untuk menjelaskan secara deksiptif satu tugas pokok dan fungsi sebagai dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Raja Ampat yang berwawasan pariwisata. Atikel/makalah ditulis dari proses pengalama personal selama betugas di dinas PUPR Kab. Raja Ampat dan mendapat rujukan dari visi-misi pemerintah Kab. Raja Ampat. Ada dua hal yang penting yang akan penulis jelaskan pada kesempatan ini yaitu: (1) Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan (2) Pembangunan Infrastruktur Berbasis Pariwisata yang berefek kesejahteraan.

**Kata Kunci:** Pembangunan Infrastruktur, Idialitas Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan infrastruktur menjadi bagian yang terpenting dalam menunjang kesesejahteraan masyarakat. Tujuan utama dari pembangunan bisa mendorong dan memberikan efek kesejahteraan masyarakat, sehingga pembangunan jangan sampai kehilangan substansi. Yang dimaksudkan dengan substansi adalah pembangunan itu harus

benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

Dikeseempatan ini kita bisa merujuk pada penelitian LIPI pada tahun 2019 yang bertajuk pembangunan infrastruktur dan dampak kesejahtraan bagi orang asli Papua (OAP). Lagi-lagi dari penelitian itu, masih memberikan kita semua catatan serius bahwa pembangunan di Papua sering kali tidak melibatkan masyarakat dengan baik, sehingga janglah salah ketiga kebijakan pembangunan tidak terlalu berefek pada meningkatnya kesejahtraan masyarakat. Problem yang nampak di permukaan adalah masalah partisipasi, memang problem partisipasi itu senantiasa menjadi satu fenomena pembangunan yang di hadapi semua daerah secara merata di Papua. Belum lagi indentifikasi 4 (empat) masalah yang melatlen di Papua dan Papua Barat yang di lakukan oleh LIPI salah satunya adalah pembangunan infrastruktur.

Konsep pengembangan wilayah wisata dapat memberikan kesejahtraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yakni menyediakan kemudahan sarana dan pelayanan logistic serta menciptakan pusat-pusat produksi. Sedangkan dalam kontes jangka panjang, pengembangan wilayah dapat mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal dan mampau mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahtraan sosial masyarakat.

Belum lagi satu tantangan di Raja Ampat sebagai daerah kepulauan yang membutuhkan satu integrasi pembangunan, sehingga saling terkait antara satu pulau dengan pulau yang lain. Oleh karena itu perencanaan pembangunan berintegrasi menjadi satu pendekatan yang tepat, jika tidak maka itu berbdapat juga pada percepatan sektor pariwisata. Contoh: kami harus membangun infrstaruktur jembatan untuk menujunjang pariwisata, tapi jika tidak ada koneksi transportasi, maka itu menghabatan mobilitas dan meningkatnya peminat pariwisata, dan akan berpengaruh pada pendapatan masyarakat, jika pendapat masyarakat menurut itu juga akan berbdapak pada indeks kesejahtraan masyarakat dan ekonomi rumah masyarakat. Oleh karena itu pembangunan yang ideal adalah yang berintegrasi.

Pesona Raja Ampat itu menggoda para wisatawan *domestik* dan internasional, sebagaimana kita ketahui keindahan Raja Ampat itu sendiri. Daerah yang mefokuskan pembangunan berbasis pariwisata.

## **KAJIAN TEORI**

Selain itu juga peranan itu juga pada level insiatif secara personal atau peranan interpersonal meliputi kepala dinas: (1) figure (kepala dinas sebagai simbol lembaga), (2) pemimpin (leader), dan (3) penghubung (liaison).

### **Pendekatan Teori Dorongan Kuat (*big push theory*)**

Pendekatan Teori ini menjelaskan bahwa perlu pembangunan infrastruktur, semua yang lain berkembang kemudian menetes, (*trickle down effect*). Teori ini selanjutnya menyatakan bahwa untuk menanggulangi hambatan pembangunan ekonomi negara terbelakang dan untuk mendorong ekonomi tersebut ke arah kemajuan diperlukan suatu “dorongan kuat” atau suatu program besar yang menyeluruh dalam bentuk suatu jumlah minimum suatu investasi. (Halima Tussa’ diah 2019).

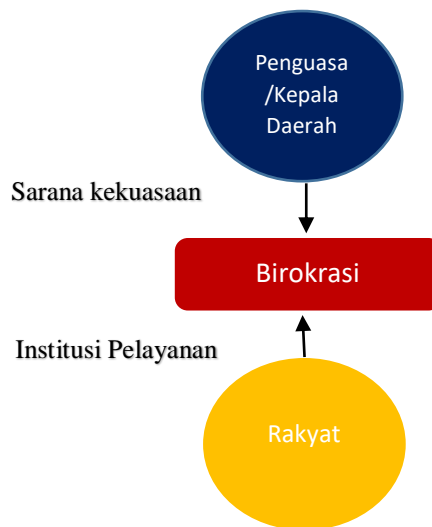
Dekker et. al. (2003) yang dikutip Putra dan Djalante (2016) menekankan bahwa pembangunan infrastruktur melalui perluasan kapasitas akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi nasional, regional dan lokal. Pembangunan infrastruktur tersebut harus bisa diterima oleh masyarakat dengan berbagai macam pertimbangan seperti pertimbangan lingkungan, tata ruang kota dan aspek sosial ekonomis meskipun biaya pengembangan menjadi lebih mahal.

W.J.S Poerwadarimta (Putra & Djalante, 2016) kesejahteraan masyarakat sejahtera menurutnya adalah ‘aman, sentosa, dan makmur’. Sehingga arti kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan dan kemakmuran. Dalam arti sempit, kata sosial menyangkut sector kesejahteraan sosial sebagai suatu bidang atau bagian dari pembangunan sosial atau kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama yang dikategorikan sebagai kelompok yang tidak beruntung dan kelompok rentan, yaitu hal

Menurut Segel dan Bruzy (Sumarto, 2003), “Kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat”. Sedangkan Wilensky dan Lebeaux (1965:138) yang dikutip Sumarto (2003) merumuskan kesejahteraan sosial sebagai sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga- lembaga sosial, yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan

Penulis punya pengalaman yang lama bekerja di birokrasi dan semenjak diangkat menjadi abdi Negara atau ASN, penulis ada tiga hal penting yang haru kita pahami pola hubunga antara birokrasi, penguasa dan rakyat. Pemahaman kita tentang pola hubungan adalah dasar filosofi selain itu juga memnag ada aturan yang mengikat kita sebagai seorang birokrat sehingga jauh keraja-keraja kita pada satu standa sebagaimana cita-cita dari konsep *good gavernances*.

**Gambar: 1.1 Pola Hubungan Birokrasi-Penguasa-Rakyat**



*Sumber: Sutiono (2012)*

Konsep ini menjadi satu pola saya dalama mengelolah biroktasi, kenapa demkian kita harus mampu memahami apa yang menjadi keingan penguasa/kepala

dareah yang ditungkan dalam visi-misi pemerintah daerah. Kemudian sebagai institusi pelayanan masyarakat dengan baik. Hubungan ini tidak mungki terpisahkan karena ini adalah hakekat kita dalam bernegara.

## **PEMBAHASAN**

Perencanaan pembangunan yang salah,  
sama halnya dengan merencanakan kesalahan.  
*(Filosofi konstruksi)*

Memulai pembahasan ini penulis memulai dengan mengutip satu regulasi untuk menceritakan bagaimana keraj-keraja kami di biroktasi terutama peranan kami di dinas Pekerjaan Uumum (PU) di Kab. Raja Ampat. Merjuka pada pada Praturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Selain Peraturan Mentri ada juga Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan ini telah mengikat kami dan menjelaskan secara gamblang tentang sistem kerja di dinas Pekerjaan Umum (PU).

Peranan kami sebagai soerang birokrat terutama di Dinas Pekerjaa Umum (PU) hal yang paling sederhanan dan utama yang kami lakukan adalah mampau menerjemahkan visi dan misi kepalah daerah/pemerintah daereh, kemudian melakukan perencanaan, impementasi dan monev, tahapan ini yang selalu kami lalui dalam mendorong percepataan pembangunan untuk mencapai kesejahtraan masyarakat di Raja Ampat. Dinas Pekerjaan Umum (PU) begitu jelas keraja-kerja kami telah tertungan dalam tiga bidang yakni: (1) Bidang Pengairan : Irigasi, Sungai, Rawa, dan Pantai. (2) Bidang Bina Marga: Jalan, Jembatan dan Saluran Drainase Induk. (3) Bidang Cipta Kerja: Sanitasi, Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan.

### **A. Pembangunan Infrastruktur dari Idalitas Pembangunan Menuju Kesejahtraan Masyarakat Kab. Raja Ampat**

Kita ketahui bahwa dalam perencanaan pembangunan di setiap daerah tidak bisa terlepas dari kepentingan politik, sebab politik kebijakan dalam di setiap pemerintah daerah selalu mengalami masalah yang sama yakni pergantian kepada daerah tak searah, sehingga pembangunan tidak terlalu efektif dalam konsep pembangunan integratif. Walau setiap pemerintah daerah punya program yang telah di tuangkan dalam dokumen perencanaan baik itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD). Karena konflik kebijakan di saat proses transisi kepemimpinan itu tidak bisa terhindari, maka menjadi penting peranan-peranan strategis birokrasi untuk mengsinkronisasi seluruh perencanaan pembangunan dengan satu model kajian evaluasi pembangunan.

RPJMD dan RPJPD adalah bagian dari turunan perencanaan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah, oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan setiap tahun dalam forum musrembang dari tingkat Kampung/Kelurahan hingga Kabupaten adalah bagian yang terintegral sebagaimana amanat UU no 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Dikeempatan ini penulis yang juga menjabat sebagai plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Raja Ampat, melalui dinas ini tentunya kita harus memahami dan bekerja sesuai TUPOKSI. Relisasi pembangunan infrastruktur di Raja Ampat penulis bicara dalam 5 prinsip yang idal yakni: perencanaan pembangunan partisipatif, holistik, kesinambungan, integratif dan kontekstual. Dan kita akan ulas satu persatu dan sesuai dengan apa yang menjadi visi misi pemerintah daerah.

### ***1. Perencanaan pembangunan infrastruktur partisipatif***

Hakekat dari pembangunan adalah melibatkan semua kalangan, setidaknya bisa semua publik punya andala dan kesempatan yang sama dalam memberikan masukan untuk satu pembangunan. Hal yang paling sederhana yang kami lakukan adalah aspirasi dari forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang), selian dari musrembang aspirasi dari masyarakat melalui aspirasi lembaga legislatif yang di jaring



pada saat masa reses, dan aspirasi masyarakat secara langsung yang bersifat emergensi/mendesak.

Makna partisipasi bagian yang terpenting karena dalam pembangunan harus melibatkan banyak orang, oleh karena itu aspirasi adalah menjadi kunci segalanya dan koreksian dari publik adalah hal-hal penting. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Raja Ampat senantiasa membuk partisipasi dari publik/masyarakat. Pembangunan yang baik itu harus diawali dengan proses perencanaan yang baik. Perencanaan pembangunan yang baik itu harus melibatkan semua stakeholders yang berkepentingan, oleh sebab itu dalam filosofi pembangunan yang ideal itu harus di penuhi beberapa aspek yakni pembangunan partisipasi, holistik, kesinambungan dan terintegrasi. Dari konsep dasar itu kita tentu memperhatikan karakteristik daerah dan visi-misi kepada daerah, mau di bawa kemana arah pembangunan daerah itu sendiri.

## ***2. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang holistik***

Pembangunan holistik bermakna bahwa perencanaan pembangunan yang memiliki padangan umum dan memiliki manfaat untuk masyarakat pada umumnya. Perencanaan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada satu komunitas masyarakat semata, tapi pembangun harus berefek dan bermanfaat untuk masyarakat Raja Ampat dan halayak publik. Jadi pembangunan tidak menguntungkan pada kepentingan individu atau kelompok tertentu, tapi bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat masyarakat Raja Ampat pada umumnya, dengan mempertimbangkan skala prioritas sesuai dengan kemampuan APBD. Perencanaan pembangunan bersifat holistik ini menjadi ceminan bahwa kesejahteraan masyarakat itu menjadi penting sebagaimana visi misi pemerintah Raja Ampat.

Di perencanaan pembangunan harus benar-banar holistik atau melihat pada semua aspek termasuk dan semua kepentingan, sehingga tidak terjadi konflik. Selain itu juga sebagai birokrasi yang bertugas di dinas pekerjaan umum (PU), harus benar-benar paham dan mampu mengkomunikasikan dari semua pihak yang baik.

### ***3. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan***

Pembangunan yang berkesinambungan adalah ruh dan arah komitmennya kepada daerah. Pembangunan harus berkesinambungan/berkaldnjutan karena satu alasan mendasar bahwa begitu banyak kepentingan dari semua sektor cukup banyak, langka-langka melalui kebijakan untuk pembangunan secara bertahap menjadi penting, sehingga tidak terjadi konflik antar sektor dalam birokrasi dan masyarakat umum (publik).

Oleh karena itu dalam perencanaan dinas Perkerajaan Umum (PU), senantiasa menguatamakan prorogram prioritas dan mendesak dan berefek langsung pada masyarakat dan sektor pariwisata. Misalnya di tahun 2020 realisasi pembangunan dari pembenahan saluran drainase di Kota Waisai, pembangunan rumah-rumah ibadah di Kab. Raja Ampat dan Pembangunan dan penyediaan air bersih di kampung-kampung dan masu dilanjutkan pada tahun 2021, program ini adalah trosan kami selama 1 tahun mejadi plt kadis PU

Tahun 2021 dinasa periode ke 2 Bupati Abdul Faris Umlati dan Ori Deko Burdam pembangunan pentahaan pante WTC, Teluk Kabui dan pembangunan infrastruktur penunjang untuk pusat wisata di daerah Misol Timur juga dalam proses pembangunan. Hal ini bagian dari pada komitem kepala daerah (Bupati) untuk melanjutk visi-misi pemerintah daerah. Perana dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Raja Ampat tetap mengkaji dokumen-dokumen perencanaan pada kepemimpinan sebelumnya yang penting dan perlu, sehingga makna pembangunan berkelanjutan/berkesinambungan bisa tercapai. Kalau tidak maka, kita akan meninggalkan banyak program yang tidak selesai.

Penulis mau cerita bahwa penetaan pante Waisai Torang Cinta (WTC) ini mejadi salah satu ikon Kab. Raja Ampat oleh karena itu proses pebanguan senantias salelau berkelanjutan, karena pembenahan, perawaan adalah bagian yang terpenting dalam konstruksi pembangunan itu sendiri. Terutama WTC sebagai ikon wisata yang setiap saat dikunjungi oleh para turusi baik domestic dan internasional.

#### ***4. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang integrasi dan kolaboratif***

Pembangunan infrastruktur yang integrasi menjadi penting karena penyatuan agenda dari semua sektor pemerintah harus terintegrasi. Misalnya pembangunan infrastruktur untuk mendorong dan menunjang akses pariwisata di Raja Ampat, maka penting program kami harus tersinkronisasi dengan dinas pariwisata, dinas perhubungan sehingga dalam perencanaan pembangunan tidak terjadi tumpang tindih antara satu dinas dengan dinas lain.

Selain itu juga prinsip integrasi penting karena sinkronisasi program infrastruktur menjadi prioritas, sehingga skala prioritas pembangunan yang didanai oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat bisa teridentifikasi dengan baik. Di kabupaten Raja Ampat sendiri ada beberapa pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dengan anggaran Provinsi dan APBN. Yang sering terjadi dan menjadi masalah adalah arah perencanaan pembangunan yang tidak integratif, sedangkan proses perencanaan yang integratif itu juga berefek pada efisiensi anggaran/penghematan anggaran dan bisa diabaikan pada kepentingan lain.

Studi kasus misalnya: program pembangunan yang masuk dalam kawasan konservasi harus ada izin dari Balai BKSDA Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu adalah satu integrasi pembangunan menjadi penting, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

#### ***5. Perencanaan pembangunan yang kontekstual***

Perencanaan pembangunan di setiap daerah harus dipahami juga dengan filosofi sosial budaya di daerah tertentu. Pelaksanaan kontekstualisasi ini dalam perencanaan pembangunan bukan serta-merta membangun semata, tapi harus dibaca dari sisi filosofi daerah itu sendiri, misalkan di pembangunan taman-taman di kota Waisai, Desai Mahkota dan Luma-Lumba menjadi satu dasar perencanaan yang menggambarkan filosofi budaya dan kekayaan alam yang ada di Raja Ampat. Oleh karena itu seorang perencana harus benar-benar memahami apa yang dasar filosofis, sejarah dan budaya

di Kab. Raja Ampat. di dinas pekerjaan umum memulai dalam perencanaan konsturksi infrastruktur senantiasa meliha konteks daerah, sehingga infrasturktur daerah yang dibangun juga menamba nilai lebih pariwisata di Kab. Raja Ampat.

Penulis mengutip satu survei yang dilakukan oleh Indeks Politik Indonesia pada tahun 2020, menunjukan bahwa para 89% (persen) wisatwan yang datang di Raja Ampat senang berfoto-foto di Ikon (tugu selamat datang kota Waisai). Nah disinilah ensensi bahwa pembangunan inforastruktur bukan saja benda mati, tapi memiliki dimensi filosofi pembangunan sesuai dengan konteks masyarakat lokal di Raja Ampat. Sehingga dalam perencanaan pembangunan daerah ini tidak kehilangan identitasnya.

## **B. Fungsionalisasi Infastruktur Sebagai Penunjang Utama Industri Pariwisata**

Pembangunan infrastruktur harus ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai merupakan salah satu faktor utama pendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Sebagai daerah otonom yang masi relative baru, kondisi infrastruktur di Kab. Raja Ampat masih dilingkupi berbagai keterbatasana. Karakter geografi sebagai daerah kepulauan memberi tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan ketesediaan infrastruktur secara lebih merata. Di samping membutuhkan biaya yang sangat besar, tingkat kesulitan terknis yang dihadapi juga sangat tinggi. Di sisi lain, penyediaan infrastruktur dasar seperti enerfi, air bersih, pemukimannya layak, serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan mutlak diperlukan untuk mengajar ketertinggalan pembangunan.

Ada tiga hal yang harus di bangun untuk menunjukan pekembangan pariwisata di Raja Ampat. Pertama, fasilitas infastruktur yang baik; Kedua, sumber daya manusia (SDM) yang memadi; dan Ketiga, jaminan keamanan. Peranan kami di dinas pekerjaan umum (PU) tentunya mendorong infrastruktur dasar penunjang pariwisata seperti jalan, jembatan (bersekalah kecil), kesediaan air bersi untuk memudahkan dan memberikan fasilitas terbaik untuk para pengunjung atau wisatawan. Satu tahun terahir kami

lakukan pelebaran dan penataan jalan ke titik wisata di kota Waisai, dan membangun 5 buah jembatan berbadaan kecil untuk akses wisata.

Program ini menjadi lagka rill dalam hal mendorong hadirnya para wisatawan di Raja Ampat, tentu jika peningkatan berkunjungnya wisatawan makan akan berefek secara ekonomi baik itu masyarakat lokal dan PAD Raja Ampat melalui retribusi. Walau kami sadari bahwa pengelolaan anggaran kami memang aga menurun pada saat masa pandemi dan konsentrasi anggaran masi terbagi pada penanganan covid 19 sampai sejauh ini, tapi konsistensi pembangunan infastruktur masi terbilang jalan sesuai dengan sekala prioritas.

Penataan kota Waisai menjadi satu prioritas penting sebagai daerah wisata, oleh karena itu peranan Dinas Perkerjaan Umum (PU) sangat dibutuhkan. Kota waisai dari sisi penetaan harus benar-benar detail karena di beberapa titik masi kelihatan kumum dan belum terurus dengan baik, hal itu juga dikarenakan faktor kesadaran masyarakat. Membangun infrastruktur untuk menggairahkan pariwisata dan geliat ekonomi masyarakat dari berbagai lapisan.

Penetaan pante Waisai Torang Cinta (WTC), kedepannya bagian dari pada poryek infrastruktur yang menunjang akses wisata baru di konsep kota pulau. Oleh karena itu melaluai Dinas Pekerjaan Umum (PU) mendorong perencanaan pembangunan, selain itu juga penataan drenase di pusat kota Waisai menjadi penting untuk menambah keindahan dan estetika kota.

Saat ini mungkin wisata alam menjadi andalan di Raja Ampa, tapi kedepan tentunya kita tetap dorong fasilitas infrastruktur sebagai salah satu spot wisata kota pulau yang modern di Raja Ampat. Hal ini suda mulai terlihat dari proses penataan pembangunan di pante WTC.

Konsep pengembangan wilayah wisata dapat memberikan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarak, yakni menyediakan kemudahan sarana dan pelayanan logistic serta menciptakan pusat-pusat produksi. Sedangkan dalam kontes

jangka panjang, pengembangan wilayah dapat mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Raja Ampat punya peran yang penting pada proses perencanaan pembangunan infrastruktur yang baik dan terintegrasi bisa menunjang perkembangan industri pariwisata di Kab. Raja Ampat.
2. Pembangunan infrastruktur memberikan efek secara riil dalam peningkatan pariwisata di Raja Ampat, efek secara ekonomi pun akan mengalami peningkatan yang signifikan, walau disadari bahwa di masa pandemic ini juga menjadi salah satu faktor penghambat.

Dari pembahasan dan deskripsi fenomena pembangunan yang terjadi di Raja Ampat, maka penting dalam penulisan ini penulis berikan beberapa masukan sebagai berikut:

1. Peningkatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Raja Ampat harus ditingkatkan, sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari visi dan misi pemerintah.
2. Di dinas Pekerjaan Umum (PU) memutuskan team work yang kuat, karena masih memiliki kekurangan SDM (terutama berkompentensi/keahlian teknik sipil dan arsitek).
3. Makalah/artikel ini ditulis dengan waktu yang cukup padat, sehingga kesempurnaan dari makalah/artikel ini belum menggambarkan atau mendeskripsikan secara utuh.

## **REFERENSI**

### **A. Buku dan Jurnal**

Tussa'diah, H. (2020). *Pengaruh Infrastruktur, Investasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja Di Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Yuliati, Y. (2018). *Dampak Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Studi Pada Masyarakat Kecamatan Arjasa Pulau Kangean Kabupaten Sumenep Kepulauan Madura*. (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

Usman, H. (2008). Peranan dan fungsi kepala sekolah/madrasah. *Jurnal tenaga kependidikan*, 3(1).

Halima Tussa'diah (2019). *Pengaruh Infrastruktur, Investasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja Di Kota Makassar*. Skripsi di UIN Alaudin Makassar.

[https://sipppa.ciptakarya.pu.go.id/sipppa\\_online/ws\\_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM\\_1503908177BAB\\_II\\_GAMBARAN\\_UMUM\\_KONDISI.pdf](https://sipppa.ciptakarya.pu.go.id/sipppa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1503908177BAB_II_GAMBARAN_UMUM_KONDISI.pdf)

## **B. Salinan Regulasi dan Internet**

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**Profil Penulis**

Penulis lahir di Tidore, 25 Mei 1988. Pendidikan S1 di tempuh di Universitas Negeri Gorontalo, S2 Administrasi Publik konsentrasi Pengembangan Masyarakat di Universitas Muhammadiyah Malang. Studi Doktorat konsentrasi sosiologi Politik di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).